

IDENTIFIKASI MELAYU DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Pheres Sunu Widjayengrono

Prodi Ilmu Sejarah, Universitas Khairun
sunu.yayan@gmail.com

Abstract

This article attempts to show the meaning of Malay, especially in Riau Archipelago, in historical perspective with mean theoretical framework divided in three periods (modern, medieval, and classic periods). It's study of intellectual history methodology and applies history method with using of related secondary sources. Comparative analysis and cultural approach's applied to data interpretation so that useful for historical analysis. Each period has characteristic meaning depended on mentality situation and bias of ideas from previous period. This article assumes that each dominantly formal or governing power in each period is primary element and cause for cultural meaning and people's acceptance of Malay definition.

Keywords: Malay, ethnic, society, cultural, identification.

PENDAHULUAN

Penggunaan kata atau istilah Melayu di masa kini telah dianggap sebagai suatu hal umum. Melayu dimaknai sebagai suatu identitas berkenaan dengan kelompok etnis serta identik dengan penggunaan unsur-unsur kebudayaan khas dalam wujud bahasa, kebiasaan, tradisi, dan pola hidup yang berbeda dengan suku-suku bangsa di Indonesia atau Asia Tenggara lainnya, dan bahkan penggunaan makna Melayu diperluas dimana identitas Melayu tidak hanya dijadikan akar bagi identifikasi suatu komunitas sosio kultural tetapi juga hingga penamaan identifikasi geografis dan negara nasional modern. Dengan kata lain, identifikasi Melayu dibatasi oleh suatu identitas dalam entitas geografis, sosial, dan kultural tertentu. Akan tetapi apakah makna sesungguhnya dan sejak kapan penggunaan kata Melayu mulai digunakan sebagai suatu identitas sosio kultural tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat Asia Tenggara dimana kata atau istilah Melayu merupakan realitas yang dijumpai dalam kehidupan keseharian. Guna menjawab pertanyaan tersebut tentu harus dilakukan peninjauan historis dan kultural dimana penggunaan kata dan istilah Melayu berlaku dalam suatu periode, dan fokus masyarakat Melayu akan dibatasi pada kawasan Kepulauan Riau.

PEMAHAMAN KONSEPTUALISASI MELAYU

Kedua contoh identitas sosio kultural di atas memberi gambaran bahwa pemaknaan identitas mulanya berkorelasi dengan unsur kekuasaan politik di masa lalu. Akan tetapi pemaknaan kata atau istilah yang mengidentifikasikan Melayu sesungguhnya tergantung dari periode penggunaannya itu sendiri. Setiap periode memiliki makna dan kecenderungan sudut pandangnya masing-masing tergantung dari nilai-nilai sosiologis dan kultural sejaman. Dengan kata lain pemaknaan Melayu sangat ditentukan oleh jiwa zaman atau *zeitgeist* dari masyarakat yang diidentifikasi sebagai Melayu.

Zeitgeist merupakan konsep filsafat yang diajukan oleh Immanuel Kant. *Zeitgeist* bermakna jiwa dari suatu periode waktu. *Zeitgeist* menggambarkan karakteristik jiwa dari suatu zaman atau generasi atau dengan kata lain jiwa zaman atau *zeitgeist* merupakan karakteristik pemikiran dan moral umum atau karakteristik perilaku dari suatu periode yang berbeda dengan periode lainnya. Berbagai faktor pembentuk jiwa zaman adalah nilai-nilai kultural dan sosiologis dari suatu periode. Seringkali batasan-batasan antar periode atau

zaman dari pemikiran atau mentalitas masyarakat begitu samar, terutama di dalam periode modern.¹ Sebagai contoh adalah mentalitas pemuda generasi kemerdekaan tentu berbeda dengan generasi 1980an, dan juga berbeda dengan generasi tahun 2010-an. Perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap perilaku serta pembentukan nilai-nilai kultural dan sosiologis dari masyarakat pendukungnya. Kondisi ini pula yang terjadi dalam pemberian makna identitas Melayu. Meskipun memiliki ruang waktu relatif panjang, setiap identifikasi identitas Melayu memiliki karakteristiknya tersendiri sejajar dengan nilai sosio kultural sezaman dan keterjangkauan dan kesesuaian logis antara realitas di suatu masa dengan akar-akar dan realitas historis dari suatu masa. Oleh karena itu pemahaman *zeitgeist* berguna sebagai konsep dan batasan guna memahami berbagai kemunculan identitas Melayu.

IDENTIFIKASI MAKNA MELAYU

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pemaknaan identitas Melayu terkait dengan tiap-tiap kurun periode yang memiliki kecenderungannya dalam pemaknaan Melayu. Dalam paper ini pemaknaan Melayu terbagi ke dalam tiga rentang periodisasi berkenaan dengan penelusuran identifikasi dan *point of view* identitas Melayu. Hal ini berfaedah untuk mencari makna dan perbedaannya guna menelusuri masa kini hingga ke asal mula identifikasi dan identitas Melayu.

1. Periode Modern

Pemaknaan Melayu dalam terminologi ini terkait dengan penggunaan identitas Melayu sebagaimana terjadi di dalam masyarakat Melayu modern dimana kalangan tokoh dan budayawan Melayu mencoba mencari perumusan identitas kemelayuan di dalam diri mereka. Secara tidak langsung hal ini terpengaruh oleh kemunculan kelas menengah baru di antara masyarakat Melayu. Bagi kalangan intelektual dan budayawan Melayu kontemporer, pemaknaan budaya Melayu dipandang sebagai suatu *way of life* atau cara hidup sebagai *Orang Melayu*. Melalui perangkat kultural berupa elemen-elemennya, intelektual Melayu kontemporer berupaya mencari pemaknaan dalam tiga hal yaitu kebahasaan, budaya atau cara hidup, dan Agama Islam. Melalui penggunaan bahasa Melayu, budaya Melayu, dan beragama Islam seseorang telah dapat dikategorikan sebagai Orang Melayu. Bias masa lalu masyarakat Melayu sebagai *open society* atau masyarakat terbuka muncul dalam pemaknaan penerimaan untuk menjadi Melayu bagi kaum pendatang non-Melayu asalkan ia bersedia memenuhi syarat atas proses internalisasi Melayu yaitu mau belajar berbahasa dan berbudaya Melayu dalam kehidupan sosial serta beragama Islam atau bersedia memeluk agama Islam bagi non-Muslim. Di sisi lain, upaya identifikasi kultural Melayu kontemporer tidak hanya diidentikan dalam kehidupan keseharian tetapi juga dikaitkan dalam unsur historis dan ilmu pengetahuan modern. Secara historis, identitas masyarakat Melayu dihubungkan dengan Kesultanan Malaka. Selain itu unsur ilmu pengetahuan modern istilah Melayu coba diinterpretasikan dalam suatu kerangka pusat-pinggiran melalui peminjaman istilah-istilah ilmu pengetahuan sebagaimana tampak dalam pembagian inti dan luar, penggolongan rumpun bahasa dan ras, dan kawasan teritorial dalam kerangka *Tamaddun Melayu*. Ketiga identifikasi identitas Melayu kontemporer tersebut tentu memiliki faktor dan unsur pendukungnya berkenaan dengan jiwa zaman atau *zeitgeist* dari periode dan nilai-nilai sosiologis dan kultural pendukungnya terkait dengan pemahaman historis.

Melalui penelaahan di atas, jiwa zaman identitas Melayu kontemporer tidak terlepas dari dua unsur utama sebagai fondasi untuk membangun kerangka pikir Melayu yaitu Kesultanan Malaka dan ilmu pengetahuan modern. Keberadaan kesultanan-kesultanan sejak abad ke-18 sebagai lembaga tradisional formal dalam masyarakat Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam membangun konsep budaya dan politik tradisional. Peminjaman unsur budaya istana merupakan idealisasi *sophistication* atau 'penghalusan elemen kebudayaan'

¹ Schilling, Georg, *Universal/University ethics with Kant, Hume, Hegel, Rousseau et al.*, (Munich: GRIN Verlag), hlm. 35.

seperti kesustraaan, tata nilai dan prilaku, dll. Hal ini didukung pula oleh kelembagaan agama Islam karena kesultanan berperan memelihara dan menjalankan agama Islam dalam kehidupan kenegaraan.² Duplikasi peran kesultanan dalam agama Islam menjadikan Islam sebagai dasar nilai dan norma religi ideal bagi masyarakat Melayu. Namun di sisi lain, bias *syiar* Islam dalam memaknai kesediaan menjadi Melayu dengan konversi agama Islam menghadirkan eksistensi dan dinamika *syiar*. Hal ini pula sesungguhnya menggambarkan keberagaman kehidupan religi masyarakat Melayu Kepulauan Riau dimana dinamika dan evolusinya justru terhenti di masa Orde Baru.

Di sisi lain idealisasi identifikasi sejarah bagi kalangan Melayu kontemporer sesungguhnya muncul dari utopia kehidupan kesultanan melalui romantisme berbagai karangan dan tulisan berupa artikel, buku, dan makalah, ataupun berbagai interpretasi kultural dan historis. Berbagai unsur legitimasi kekuasaan kesultanan menjadi syarat mutlak bagi pemahaman identitas Melayu modern. Silsilah raja dan penerimaannya secara mutlak menjadi syarat guna karakteristik identitas Melayu Kepulauan Riau kontemporer. Oleh karena itu kesesuaian dan kesejajaran nilai-nilai kontemporer antara dunia Melayu Kepulauan Riau kontemporer dengan dunia Kesultanan menempatkan Kesultanan sebagai akar dan landasan idealisasi nilai dan norma kehidupan keseharian Melayu di masa kini.³

Berbeda dengan idealisasi nilai dan norma lembaga kesultanan, ilmu pengetahuan modern turut berperan atas konstruksi pemaknaan dan identitas Melayu kontemporer. Dominasi ilmu pengetahuan barat dalam metode dan substansi di masa kontemporer menyebabkan penerimaan mutlak atas konsep-konsep akademis yang diusungnya. Akan tetapi pemahaman akademis tersebut dalam banyak hal diinterpretasikan sesuai dengan akulturasi dan *zeitgeist* dari penggagasnya. Fenomena ini muncul dari penggunaan istilah Melayu dalam identifikasi Melayu sebagai suatu rumpun kebahasaan dan ras. Situasi ini dilatarbelakangi oleh generalisasi Melayu sebagai kesatuan kolektif beberapa bangsa Asia Tenggara yang muncul di pertengahan abad ke-18. Generalisasi ini kian mantap di paruh kedua abad ke-19 yang merupakan titik awal perkembangan keilmuan sosial atau ilmu tentang manusia (*geisteswissenschaften*) baik dalam hal filsafat maupun metodenya. Hal ini dapat dianggap sebagai patokan penggunaan istilah Melayu dalam kerangka akademis ilmu sosial sebagaimana istilah Indonesia pertama kali digunakan oleh Adolf Bastian dalam menggeneralisasikan masyarakat di Kepulauan Nusantara sebagai Indonesia. Pergeseran istilah keilmuan antropologi Indonesia menjadi suatu konsep politis terjadi sejak tahun 1920an dengan identifikasi penduduk pribumi non-Eropa sebagai orang Indonesia, bahkan penggunaan konsep Indonesia Raya diperluas hingga ke luar batas geopolitik Negara Hindia Belanda sebagaimana konsep Indonesia secara antropologis. Hal ini memiliki kesejajaran dengan kerangka konseptual *tamaddun* Melayu dimana menunjukkan perluasan makna tidak hanya dalam makna sosiologis tetapi juga geografis dan geopolitis. Kesejajaran pemahaman identitas kultural, ras, dan politik semacam ini sesungguhnya terjadi pada berbagai identifikasi kultural di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Penyesuaian antara ideologi, baik secara individual dan komunitas dalam suatu batas-batas tertentu menciptakan proses pembayangan atas kehidupan dan komunitas ideal. Salah satu ciri dalam pembentukan komunitas yang dibayangkan ini adalah percampuran antara ideologi tradisional sezaman (bergantung dari

² Tusiran Suseno, Amiruddin, Teja Al-Habd, “*Butang Emas*”, *Warisan Budaya Melayu Kepulauan Riau*. (Tanjungpinang: Yayasan Bunda Pustaka & Pemerintah Kota Tanjungpinang, 2006) hlm. 15-19; Haji Abdul Malik dkk. *Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah, Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761-1812)*, (Daik-Lingga: Pemerintah Kabupaten Lingga, 2012) hlm. 155-170.

³ Zulkifli Harto, dkk. *Pengkajian dan Pendataan Obyek Sejarah Kesultanan Lingga*. (Daik-Lingga: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lingga), hlm. 14-16; Hageman, J. *Geschiedenis der Veroveringen in Malaka en der Oorlogen Tuschen de Portuguezzen en Malaiers*.

periode dan *zeitgeist*-nya) dan modern guna mencari kesatuan pemikiran dalam gagasan kekuasaan.⁴

2. Periode Madya

Berbeda dengan identifikasi Melayu kontemporer, identifikasi Melayu dari periode sebelumnya adalah gambaran identifikasi makna Melayu berdasarkan arti harafiahnya. Melayu diartikan sebagai *Mlayu* atau dalam bahasa Jawa berarti lari. Pemaknaan *Mlayu* sebagai *berlari* bertepatan dengan masa kedatangan Bangsa Eropa dan Islam di Nusantara. Hal ini didukung oleh catatan awal bangsa Portugis dan Belanda yang mengidentifikasi bangsa *Mlayu* sebagai bangsa pelarian. Selain itu karakter bangsa Melayu yang suka berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya kian menguatkan anggapan bahwa istilah Melayu diidentikan dengan kehidupan berpindah-pindah. Situasi berpindah-pindah ini pula yang digunakan oleh orang Melayu sebagai penolakan atas makna sebagai bangsa pelarian dengan mendefinisikan Melayu secara harafiah sebagai Melaju atau bepergian.⁵

Salah satu hal yang harus dicermati adalah penggunaan makna Melayu dari kategori ini memiliki rentang waktu yang cukup panjang sejak masa pra Islam hingga masa kini, dimana banyak kaum akademisi barat memanfaatkan folklor dan tradisi makna ini, sebelum pada akhirnya coba digeser menjadi makna baru oleh kaum intelektual Melayu kontemporer. Oleh karena itu pemahaman atas pemaknaan ini sesungguhnya harus disikapi secara hati-hati dan kritis karena memiliki konotasi negatif bagi masyarakat Melayu yang 'seolah-olah' bangsa tak berbudaya dan beridentitas. Penolakan kaum intelektual dan budayawan Melayu kontemporer sesungguhnya merupakan sikap resistensi atas realitas kekinian yang memberi ruang atas interpretasi makna Melayu secara demokratis.⁶

Akan tetapi, pada kenyataannya anggapan Melayu sebagai bangsa 'pelarian' merupakan kondisi yang tak dapat dibantah di masa tersebut. Bahkan, pemaknaan istilah ini justru tidak tergantikan selama berabad-abad, termasuk di masa Kesultanan dan kolonial Belanda, sebagai makna yang 'terlanjur' dipahami secara umum oleh karena berbagai faktor. Guna memahami hal tersebut, dibutuhkan tinjauan lebih jauh ke masa pra-Islam dan membandingkan sejak kapan kedudukan Melayu menjadi subordinat secara sosio kultural.

Pertama-tama, tinjauan akan kembali ke abad ke-13 atau ketika Kertanegara dari kerajaan Singasari-Jawa melakukan ekspedisi Pamalayu atas Bhumi Melayu. Di masa ini konteks Melayu masih dalam konotasi positif. Istilah Bhumi Melayu ditekankan atas lokasi kota Dharmasraya yang kini 'diduga' di pesisir Sungai Batanghari-Jambi.⁷ Akan tetapi, hal menarik adalah penggunaan istilah Melayu atas ekspedisi atas wilayah kerajaan di daratan Asia Tenggara menunjukkan adanya generalisasi di masa tersebut, terutama dalam aspek linguistik. Konotasi positif makna Melayu di masa Kertanegara justru berubah di masa Majapahit khususnya di sekitar abad ke-14. Kedudukan dominan Melayu selama berabad-abad sebelumnya dengan seketika sirna di bawah kekuasaan Majapahit. Dominasi politik dan

⁴ Anderson, Benedict, *Imagined Communities*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 268.

⁵ Antonio Cartesao, *The Suma Oriental of Tomi Pires, An Account of the East, From the Red Sea to Japan, Written in Malacca 1512-1511 and the Book of Fransisco Rodrigues* (Lessing-Druckerel: Wiesbaden), hlm. 264. Kemunculan pemaknaan Melayu dari periode madya terdapat di berbagai sumber Eropa, baik Portugis maupun Belanda. Keberadaan tersebut tentu merupakan hal menarik karena sesungguhnya membuktikan sebagian besar penulis Eropa hanya menerima informasi sepihak dari penduduk lokal tanpa verifikasi ataupun menangkap anggapan umum yang berlaku tanpa bersusah payah melakukan perbandingan.

⁶ Evi Susanti, "Transkrip sejarah lisan: eksistensi drama tradisional Makyong di Pulau Panjang di era reformasi", Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau Kepulauan Batam, 2013.

⁷ Slamet Mulyana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. (Jakarta: LKIS, 2006), hlm. 16.

kekuasaan Majapahit atas sebagian besar bangsa berbahasa Melayu menyebabkan turunya status negeri-negeri berbahasa Melayu menjadi kerajaan vasal. Kondisi inipun sejajar dengan turunnya kedudukan status sosio kultural masyarakat berbahasa Melayu dalam stratifikasi sosio kultural di masa tersebut.⁸

Hal ini didukung pula oleh fenomena kesejarahan bahwa identitas politik Melayu adalah sebagai entitas negeri Budhis, yang menempatkannya sebagai kompetitor utama kerajaan Hindu baik dalam ruang lingkup Nusantara ataupun Asia. Sebagaimana diketahui, kebangkitan kerajaan Budha sejak abad ke-5 M di India dan abad ke-7 M di Cina menenggelamkan banyak kerajaan Hindu di India ataupun dinasti Cina tradisional, sedangkan di Nusantara kemunculan kerajaan Sriwijaya, meruntuhkan banyak kekuasaan Hindu di Nusantara dan menguasai atau mengancam kerajaan-kerajaan tradisional di Jawa. Kondisi ini pula yang menyebabkan terjadinya pemisahan religi antara Hindu dan Budha di Jawa di kala itu dimana kerajaan Budha merupakan kerajaan dominan dan ancaman bagi kekuasaan tradisional karena dukungan Sriwijaya.⁹ Merosotnya kekuasaan Dinasti Tang dan kebangkitan kerajaan Hindu di India bagian selatan akibat meningkatnya ekspor kain, berjalan sejajar dengan kebangkitan kerajaan Hindu di Jawa. Kebangkitan Kediri, Kahuripan, Pajajaran, dll. merupakan bukti kuat akibat adanya jaringan dagang berdasarkan ikatan ekonomi dan kultural. Penaklukan Sriwijaya oleh Kerajaan Chola, India dan kemudian Majapahit membalikan tatanan dunia Melayu berlawanan dengan masa sebelumnya. Pada era baru, khususnya sejak abad ke-13, dunia Melayu perlahan-lahan menuju kepada marjinalitas politik, dan berpuncak dengan penaklukan Majapahit atasnya.¹⁰

Sebagaimana telah lazim diketahui bahwa dalam tradisi sebuah kekuasaan tentu diiringi dengan pembentukan nilai baru baik secara sosial dan kultural guna mendukung legitimasi kekuasaannya. Penyederhanaan sebutan Melayu dalam bahasa Jawa sesungguhnya memiliki arti luas dalam *zeitgeist* di periode tersebut dimana memiliki keterkaitan dengan stratifikasi dan diferensiasi sosial kekuasaan Majapahit untuk memisahkan antara penguasa dan taklukannya. Kedudukan bangsa pelarian (Jawa: *Mlayu*) ini didukung pula oleh kecenderungan masyarakat Melayu yang terperosok pada kehidupan nomaden guna menghindari ancaman penguasa yang telah mendominasi pusat-pusat pemukiman. Keterpurukan identitas Melayu kian menonjol dengan kian menguatnya Kerajaan Majapahit di Nusantara dan didukung oleh kemajuan sistem administrasi kekuasaan Majapahit di masa tersebut yang tidak hanya menempatkan kerajaan taklukan sebagai vasal dan pengirim upeti belaka tetapi juga sebagai pihak dominan terhadap jalannya administrasi kekuasaan lokal. Penaklukan wilayah yang disertai pembentukan nilai, mitos, dan legalisasi kekuasaan tradisional oleh Majapahit ini tidak hanya dapat dilihat di negeri-negeri Melayu tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia lainnya seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, hingga Maluku.¹¹

⁸ Cartesao, *Op.cit.*, hlm. 236.

⁹ Frederick M. Smith, *The Self Possessed: Deity and Spirit Possession in South Asian Literature and Civilization*. (New York: Columbia University, 1995), hlm. 439.

¹⁰ Slamet Mulyana, *Menuju Puncak Kemegahan: Sejarah Kerajaan Majapahit*. (Jakarta: LKIS, 2005), hlm. 73; Slamet Mulyana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. (Jakarta: LKIS, 2006), hlm. 138, 142.

¹¹ Fraassen, Christiaan van, "Drie plaatsnamen uit Oost-Indonesië in de Nagara-Kertagama: Galiyao, Muar en Wwanin en de vroege handelsgeschiedenis van de Ambonse eilanden" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 132 (1976), no: 2/3*, Leiden, hlm. 293-6; Fraassen, Ch. Van, *Ternate, De Molukken en De Indonesische Archipel, Van Soa Organisatie en Vierdeling: Een Studie van Traditionele Samenleving en Cultuur en Indonesia*, Deel I & II, Disertasi Universiteit Leiden 1987, hlm. 15-28; Coolhaas, "Mededeelingen betreffende de Onderafdeeling Bacan" dalam *BKI Deel 82*. ('s Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1927); J. Noorduyt, "Majapahit in the fifteenth century" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 134 (1978), no: 2/3*, Leiden, hlm. 228.

Keruntuhan kekuasaan Majapahit tidak serta merta membawa pergantian legalitas kekuasaan tradisional secara revolusioner. Majapahit yang diidentikan sebagai penguasa Jawa, baik penduduk maupun negeri, telah menempatkan kedudukan Jawa pada posisi dominan dalam legalitas kekuasaan tradisional. Bahkan penguasa kerajaan Melayu Islam terbesar, Kesultanan Malaka, Parameswara menganggap sebagai bagian Jawa-Majapahit, meskipun bukti-bukti kesejarahan tidak menunjukkan hubungan genealogis. Hal ini harus dicermati secara kritis dari budaya politik dan *point of view* di masa tersebut. Berbagai bukti yang menunjukkan ketidakterkaitan genealogis Parameswara dengan Majapahit, lebih menunjukkan pada realitas historis bahwa Kesultanan Malaka menggunakan unsur 'Majapahit' sebagai legalitas kekuasaan politik di masa tersebut guna memperoleh pengikut dan pengakuan dari kerajaan yang dianggap sebagai pusat. Hal inilah yang membantu Malaka tumbuh menjadi salah satu pusat perdagangan terbesar di dunia pada masa itu. Kejatuhan Kesultanan Malaka, dan pengakuan berbagai kesultanan sebagai pewaris kejayaan Kesultanan Malaka setelahnya baik di Semenanjung Malaya maupun di wilayah Selat (kini menjadi wilayah Singapura dan Kepulauan Riau) memberi indikasi atas adanya ideologi kontinuitas dan identitas politik di Asia Tenggara umumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa kontinuitas berupa kelanjutan dan pewarisan kekuasaan yang dipersonifikasikan sebagai kesatuan ikatan kerabat merupakan hal umum dalam ideologi dan legalisasi kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional.¹² Akan tetapi, meskipun kejayaan Majapahit telah lama berlalu dan dilupakan, pembentukan kesultanan-kesultanan baru tidak mampu mengganti identitas Melayu sebagaimana pemaknaan masa Majapahit yang melekat sebagai *ideofact* (fakta ide). Kesultanan-kesultanan baru di antara penduduk Melayu hanya mampu memberi identitas lokalitas dalam batasan geopolitik mereka masing-masing dan terlalu sibuk dalam dinamika politik, baik berupa kompetisi, konflik, maupun asosiasi di antara mereka.¹³

Peran penting jiwa zaman tampak bahwa meskipun perkembangan awal Islam di Nusantara sesungguhnya memiliki derajat, waktu, dan faktor yang sangat acak, namun *zeitgeist* periode tersebut atas gagasan kekuasaan dan legalitas sakralnya masih menempatkan dinamika politik dan agama di Majapahit atau Jawa dalam kedudukan dominan. Kesejajaran kemunculan Islam dan kekuasaan politik di Jawa tidak serta merta diterjemahkan oleh kesultanan dan ulama Islam Jawa sebagai pemberontakan atau titik baru melainkan kontinuitas dari suatu hal yang telah ada sebelumnya.

Legalitas 'Jawa' sebagai posisi dominan dan jiwa zaman yang mendukung di periode madya tampak dari bagaimana sekelompok kecil umat Muslim di Vietnam disebut dengan agama Jawi dan huruf-huruf atau aksara Arab dengan bahasa Melayu dianggap sebagai aksara Jawi.¹⁴ Berkenaan dengan aksara Jawi, situasi ini tentu membuat rumit karena kedudukan penting bahasa Melayu sebagai bahasa tulis kekuasaan dan agama, tidak hanya terjadi di negeri berbahasa Melayu, tetapi meluas di berbagai negeri-negeri di Nusantara hingga Indonesia Timur dimana umumnya disebut sebagai huruf Jawi. Jika dipikirkan secara logis, apakah mungkin ulama-ulama Jawa yang telah disibukan oleh proses Islamisasi di Jawa atau siapapun yang berasal dan berbahasa ibu Jawa mampu mengubah aksara dan fonem Arab ke dalam fonem, kata, atau tata bahasa Melayu secara detail sehingga banyak di antaranya menghasilkan karya-karya kesusastraan Islam yang mengagumkan. Selain itu adalah tidak logis, anakronis, dan ahistoris jika persebaran agama Islam di Nusantara seluruhnya hanya berpusat di Jawa, karena data kesejarahan menunjukkan bahwa banyak

¹² Leonard Andaya, *The World of Maluku, Eastern Indonesia in the Early Modern Period*, (Honolulu: University of Hawaii Press, 1993), hlm. 21-24.

¹³ V. Wee & C. Chou, "Continuity and discontinuity in the multiple realities of Riau" in *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Riau in transition 153* (1997), no: 4, Leiden, 528-9

¹⁴ Kozok, Uli, *Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 69.

bagian di sekitar Pulau Sumatera dan negeri berbahasa Melayu telah lebih dulu mengenal agama Islam oleh karena faktor keteracakan masuknya agama Islam dan sisi penting faktor ekonomi sebagai awal interaksi.¹⁵ Akan tetapi keberadaan aksara Jawi akan menjadi logis jika meninjau jiwa zaman di periode tersebut. Legalisasi budaya dan politik dengan menempatkan Jawa atau Majapahit sebagai patron dari 'budaya istana' atau 'budaya penguasa' dan hal inilah yang menempatkan istilah Melayu dalam posisi subordinat.

3. Periode Klasik

Pemaknaan Melayu dalam legalitas Jawa di atas bukan merupakan awal dari pemaknaan istilah Melayu. Realitas di masa Majapahit, bahkan Singasari dengan penyebutan Ekspedisi Pamalayu, sesungguhnya memberi petunjuk bahwa penggunaan kata Melayu sebagai suatu identifikasi dan identitas sosial telah ada dan mapan di masa tersebut. Oleh karena itu penelusuran akar makna Melayu harus lebih jauh ke belakang pada masa dominasi kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di abad ke-7 M dan membawa dunia Melayu ke puncak kejayaan dengan memiliki pengaruh ke berbagai wilayah Nusantara, bahkan hingga ke Maluku, dalam ikatan politik dan perdagangan sebelum pergeseran politik dan *ideofact*-nya di abad ke-14.¹⁶

Penggunaan kata Melayu di dunia kuno sesungguhnya telah muncul dalam berbagai catatan. Penyebutan Melayu tertua hadir di kitab *Vayu Purana*. Dalam kitab ini disebutkan tentang *Malayadvipa* (*Malayadwipa* = Tanah Malaya) yang berarti "dataran pulau-pegunungan" dan digambarkan sebagai salah satu provinsi di kepulauan sebelah timur yang bersifat mistis namun berlimpahan emas dan perak. Selain itu beberapa ahli menyamakan istilah Melayu dengan Sumatra, tetapi beberapa ilmuwan India mempercayai istilah Melayu mengacu pada Semenanjung Malaya yang sangat bergunung-gunung, sedangkan Sumatra lebih tepat dihubungkan dengan *Suvarnavadvipa* (*Suvarnadwipa* = Tanah Sumatra).¹⁷ Catatan lainnya adalah *Geographia* karangan Ptolomeus yang menyebutkan *Maleu-kolon*. Istilah ini dipercaya sebagai saduran dari istilah Sansakerta, *malayakolam* atau *malaikurram* dari periode yang lebih tua. Nama ini diasosiasikan dengan sebuah kerajaan yang memiliki sebuah gunung kuat bagi pertahanannya yang jatuh oleh invasi kerajaan Chola di bawah pimpinan Rajendra Chola I pada abad ke-11 yang mengacu Sriwijaya. Selain itu *Bhumi Malayu* dari inskripsi Padang Roco pada 1286 dianggap oleh Slamet Mulyana sebagai Kerajaan Dharmasraya.¹⁸ Kronik Dinasti Yuan di abad ke-13 juga menuliskan *Ma-li-yu-er* mengacu pada suatu kerajaan di Semenanjung Malaya yang harus menghadapi ekspansi ke arah selatan Siam di bawah Kerajaan Sukhotai dan juga disebut dalam catatan Marco Polo sebagai *Malauir*.¹⁹

Akan tetapi identifikasi Melayu di atas memiliki keterbatasan bukti-bukti penunjang. Sebaliknya, identifikasi Melayu paling tampak jelas pada catatan historis dari dua kerajaan besar di masa kuno yaitu Kerajaan Melayu di Jambi dan Sriwijaya. Dalam suatu inskripsi Cina masa Dinasti Tang memberitakan tentang adanya penggunaan istilah Melayu sebagai nama Kerajaan. Seorang Biku Budha dari Kerajaan Tang mengunjungi Kepulauan Melayu antara

¹⁵ Marie-France Dupoizat, Untung Sunaryo, Heddy Surachman, 2008. *Barus: Seribu Tahun Yang Lalu*, (Jakarta: KPG, 2003), hlm. 32.

¹⁶ Coolhas, *Op.cit.*,

¹⁷ Govind Chandra Pande, *India's Interaction with Southeast Asia*, (New Delhi: Project of History of Indian Science, Philosophy, and Culture, Centre for Studies in Civilizations, 2006), hlm. 89, 95, 265; R.A. Donkin, *Between East and West: The Moluccas and The Traffic in Spices*, (American Philosophical Society, 2003), hlm. 80; Ramesh Chandra Majumdar, *Suvarnavadvipa: Political History*, (New Delhi: Gyan Publishing House, 1986), hlm. 38, 48)

¹⁸ Slamet Mulyana, *Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 243.

¹⁹ Thomas Wright, *The Travels of Marco Polo, The Venetian: The Translation of Marsden Revised, With a Selection of His Notes*. (Montana: Kessinger Publishing, LLC., 2004), hlm. 364-5.

tahun 688-695. Dia memberitahukan bahwa Melayu berada dalam jarak 15 hari berlayar dari *Bogha* (Palembang), ibukota kerajaan *Sribhoga* (*Srivijaya*) dan juga dalam waktu berlayar yang sama untuk mencapai *Ka-Cha* (*Kedah*) dari *Mo-lo-yu*, sehingga setidaknya Melayu terletak di tengah-tengah di antara keduanya. Suatu teori yang dikemukakan ilmuwan menghubungkan Melayu dengan Jambi kontemporer di pesisir timur Sumatra. Hal ini didukung pula oleh adanya pusat pemerintahan kerajaan kuno di pesisir sungai Batanghari serta sebuah anak sungai yang diberi nama Sungai Melayu, meskipun relasi antara Melayu dan Jambi bertentangan dengan teks-teks dari Dinasti Yuan (1271–1368) dan Ming (1368–1644), mengacu pada suatu negara di dekat laut bagian selatan.

Istilah Melayu juga muncul dalam sejarah Sriwijaya yang terbukti merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara dan memiliki pengaruh baik sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak hanya di Nusantara dengan batas timur di Kepulauan Maluku, tetapi juga menembus batas kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan penempatan makna istilah Melayu sebelumnya, penggunaan kata Melayu di Sriwijaya disertai berbagai bukti-bukti kesejarahan otentik berupa prasasti dan *ideofact* berupa folklor atau cerita rakyat. Selain itu data-data mengenai pemaknaan Melayu menunjukkan relasi luas terkait dengan interaksi kultural, sosial, hingga pemaknaan atas *zeitgeist* periode tersebut atas berbagai fenomena yang mengendap dalam karakteristik Melayu. Langkah awal dilakukan di tahun 1934-1939 yang memberi tempat pada penggunaan sumber-sumber tradisional Melayu yang tersimpan di rak-rak kearsipan kesultanan dan masyarakat Melayu kebanyakan. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan kombinasi antara penggunaan sumber Eropa dan pribumi melalui komparasi data dan interpretasi kultural justru menguak selubung misteri etimologi Melayu.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah tinjauan tentang keberadaan situs Sriwijaya di Bukit Siguntang yang sesungguhnya memiliki peran penting bukan hanya bagi Kerajaan Sriwijaya sendiri, tetapi juga untuk memahami proses identifikasi Melayu. Sebuah prasasti di sungai Kedukan Bukit tahun 683 M menceritakan bahwa raja telah berlayar untuk memperoleh kekuatan magis. Ia meninggalkan Menanga Tambang dengan diiringi 20.000 pasukan bersenjata. Ia datang kemari dan mendirikan kota Srivijaya, dimana sebelumnya wilayah itu disebut sebagai "Malayu". Penamaan Melayu ini sesungguhnya tidak serta merta hilang seiring perubahan nama menjadi Sriwijaya. Penduduk Palembang di tahun 1920-an masih mengetahui dan mengenal bahwa anak sungai Tatang yang terletak tak jauh dari Palembang, di masa lalu disebut dengan *Malajoe* (Malayu). Di masa lalu terdapat suatu distrik Tanah Malayu dan terletak di hulu sungai Musi dan di antara tanah kecil ini, dan Palembang kontemporer adalah daratan Poeloe Widjaja, yang mengingatkan atas 'kota yang jaya'.²⁰

Salah satu wilayah penting di tempat ini adalah Bukit Seguntang yang memiliki berbagai keterikatan historis dengan berbagai cerita rakyat. Hal ini bahkan dimulai sebelum periode Sriwijaya-Budhis dimana Bukit Seguntang justru termasuk dalam pusat pemukiman Hindu melalui keberadaan 4 tempat suci Hindu sebagaimana interpretasi logis dari dinasti baru Budhis yang berasal dari Menanga Tambang. Satu di puncak, satu di dasar barat, satu di dasar bukit ke tenggara, satu sekitar 2 km ke arah utara, dimana gambaran Budha besar ditemukan, serta penamaan Bukit Seguntang sebagai Siguntang Mahameru. Peran penting Bukit Siguntang adalah adanya keterkaitan antara pemukiman awal kaum migran jauh ke periode sebelum kehadiran Hindu melalui folklor yang tercatat dalam kesusastraan Melayu dan masih hidup, namun telah terpinggirkan, di periode awal abad ke-19.²¹ Selain itu, *folklore* Bukit

²⁰ F.M. Schnitger, F.M., Christoph von Fürer-Haimendorf, G. L. Tichelman, *Forgotten Kingdoms in Sumatra*. (Oxford: Oxford University Press, 1989) hlm. 7-8; C. van Angelbeek, *Angelbeek, C. van. 1862. Korte Schets van het Eiland Lingga en Deszelfs Bewoners*. Batavia: Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

²¹ Keberadaan penting daerah aliran sungai Musi, dan wilayah Sumatra bagian selatan umumnya, sebagai wilayah pemukiman padat di masa prasejarah juga telah dibuktikan dengan keberadaan wilayah Kabupaten Lahat sebagai daerah yang memiliki bukti arkeologi dari periode megalithikum terbanyak dan tersebar dalam area luas yang terbatas. Bahkan di masa modern ini, Kabupaten Lahat dikukuhkan

Seguntang lainnya menunjukkan keterkaitan antara penduduk Melayu dengan Alexander Agung (Iskandar Zulkarnaen) yang diyakini turun dari langit di Bukit Seguntang. Dikisahkan ada dua orang janda tua, pemilik lahan di bukit ini, yang melihat cahaya berkilauan di suatu malam. Ketika mendekat, janda itu melihat seorang pria duduk di atas kerbau putih. Ia menjadi raja pertama Palembang dan ia bernama Sri Turi Buwana dan beberapa tahun kemudian, ia berlayar melintasi lautan dan mendirikan kota Singapura. Temuan atas 4 makam megalithikum dalam 4 tumpukan batu yang diletakkan dalam 1 baris, disesuaikan atas keyakinan masyarakat lokal di awal abad ke-19 yang menyebutkan bahwa makam kuno tersebut adalah makam keturunan Iskandar Zulkarnaen. Keyakinan masyarakat Palembang di masa lalu atas kedudukan sakral tempat ini juga didukung oleh adanya mitologisasi wilayah ini dengan berbagai cerita rakyat. Mitologisasi pertama dihubungkan dengan kisah Ramayana yang menurut mitos, ke arah hilir sungai Musi, di sisi kanannya, terdapat Gunung Mahmiru (Mahameru), gunung suci yang dahulunya membayangi Palembang. Tetapi si kera putih Anoman merenggut puncaknya dan menghempaskannya ke Rawana yang sedang terluka. Meskipun demikian Rawana belum juga mati. Darah Rawana masih tetap mengalir dan menggemakan ikan sepat di Singapura. Selain itu terdapat pula cerita tentang Batoe Ampar yaitu kapal yang berubah menjadi batu. Pemiliknya adalah Dempoe Awang, yang menjadi kaya tetapi durhaka kepada ibunya dan pada saat itu juga ibunya merubahnya menjadi burung *lang* (elang). Legenda ini dengan berbagai versinya dikenal dan menyebar ke seluruh wilayah Sumatra dan Borneo.²²

Peran sakral Bukit Seguntang melalui *folklore* rupanya terus terjaga, bahkan diyakini oleh penguasa pasca-Sriwijaya yaitu Majapahit. Konon, di tempat itu berdiam seorang suci (mungkin brahmana atau resi) Majapahit. Dialah yang memberi perayaan pahlawan Si Pait Lidah, seorang tokoh pahlawan mitologis rakyat, yang memiliki kekuatan supernatural dengan meludah dari mulutnya. Di dekatnya terdapat jejak kaki Demang Lebar Daun, yang diyakini sebagai pendiri awal kekuasaan tradisional di Kepulauan Riau yaitu Singapura, Bintan, dan Lingga, dan diakui dalam mitologi kekuasaan di antara masyarakat Pulau Lingga hingga saat ini. Bahkan, selama berabad-abad penduduk Palembang kuno percaya sekali sumpah yang paling disucikan ada di bukit ini, dan hingga periode 1940an, tempat-tempat suci di puncak ini masih kerap dikunjungi oleh peziarah dan ditaburi bunga-bunga.²³

Keberadaan penting lokasi ibukota kerajaan Sriwijaya dan pemaknaan Melayu di atas sebaiknya harus ditinjau dalam berbagai aspek yang menunjukkan identitas dan kebesaran Melayu di masa lampau. Sebagai salah satu sumber ide dan pengetahuan terhadap masyarakat berbahasa Melayu di masa lampau, berbagai interpretasi akan dilakukan guna mendukung pemaknaan dan etimologi Melayu itu sendiri. Awal mula interpretasi menunjukkan bahwa keberadaan peradaban Melayu di Sungai Musi sebagai salah satu pusat *renaissance* kesusastaan di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya penyesuaian letak geografis area Sungai Musi dengan mitologi kuno India tentang pembentukan dunia dan lokasi Gunung Mahameru hingga kisah Ramayana. Jika sebelumnya Kerajaan Kediri di Jawa pada abad ke-12 dikenal sebagai awal mula tradisi kesusastaan di Nusantara melalui upaya Jawanisasi kisah Mahabarata dengan menempatkannya dalam ruang geografis di Pulau Jawa, maka sesungguhnya peradaban Melayu-Hindu di Sungai Musi pada abad ke-7 telah

oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai kabupaten dengan peninggalan situs megalithikum terbanyak di Indonesia baik berupa dolmen, arca, sarkofagus, punden, dll. Hal yang menarik adalah dalam banyak hal bukti-bukti arkeologis ini memiliki beberapa kemiripan dengan bukti-bukti arkeologis di berbagai wilayah Sumatra bahkan di berbagai pulau di pesisir timur Sumatra, atau yang kini dikenal sebagai Kepulauan Riau.

²² Schnitger, et.al., *Op.cit.*, hlm. 9; Angeelbeek, *Op.cit.*, hlm. 19-22; Kisah mengenai Batu Ampar mengingatkan kepada kisah legendaris Malin Kundang dari penduduk Minangkabau, Sumatra bagian barat, yang terkenal di seluruh penduduk Nusantara. Kemiripan atas alur, tokoh, dan setting, dalam berbagai kisah serupa layaknya memberi gambaran tentang adanya benturan antara kebudayaan lokal dan eksternal.

²³ Schnitger, et.al., *Loc.cit.*,

ada terlebih dahulu melalui proses Melanyunisasi kisah Ramayana yang secara genealogis lebih tua dibandingkan Mahabharata. Dengan adanya bukti ini menunjukkan bahwa dalam peradaban kuno Melayu di Sungai Musi telah terdapat kalangan intelektual-keagamaan dalam jumlah cukup mapan dan stabil sebelum digantikan peranannya oleh para pendeta Budha.

Kedudukan penting unsur Hindu dan perubahan menjadi Budha juga membuktikan adanya keterkaitan erat antara kedudukan Sungai Musi dan perubahan-perubahan di kawasan Asia kuno. Kebangkitan agama Budha di India dan Cina sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya rupanya turut mempengaruhi dinamika politik dan kebudayaan di Sriwijaya oleh karena hubungan perdagangan dan politik internasional. Perubahan dan pergeseran dominasi kekuasaan dan kebudayaan religi di Asia tersebut juga turut mempengaruhi dinamika di Sriwijaya yang kemudian lebih dikenal sebagai kerajaan Budhis. Meskipun demikian, pengaruh India dalam menempatkan peran penting gunung dalam kosmologi sosial, tata ruang, dan kekuasaan juga terdapat sini. Sangat disayangkan tidak terdapat manuskrip dari Sriwijaya atau dunia Melayu kuno mengenai kosmologi ruang ini. Tetapi hal tersebut dapat dicari solusinya melalui komparasi dengan konsepsi kosmologi kuno yang terdapat di dalam kekuasaan Jawa tradisional yang juga menempatkan peran penting gunung dalam kosmologi tata ruang. Bagi masyarakat Jawa tradisional, gunung tidak hanya dianggap sebagai suatu bentang alam tak bermakna tetapi juga sebagai media pemujaan dari sesuatu hal sakral. Gunung menempatkan ketidakberdayaan dan ketidakterjangkauan umat manusia di kala itu. Kondisi inilah yang menempatkan gunung dianggap sebagai tempat para Dewa dan roh-roh penjaga bersemayam. Nilai sakral gunung turut mempengaruhi strukturalisasi nilai sakral, kesalehan, dan pengetahuan manusia di dalam upaya mencapai kesempurnaan hidup melalui panduan religi menuju kehidupan ideal sebagaimana digambarkan dengan perilaku dewa-dewa. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Candi Borobudur yang membagi-bagi tingkatan keagamaan dan pengetahuan manusia hingga kepada pengetahuan tertinggi di stupa terbesar di puncaknya. Alasan tersebut menempatkan mengapa keempat makam keturunan Alexander Agung terdapat di puncak gunung sebagai perwujudan tingkat kedewataan mereka dalam bentuk akulturasi budaya India dan Indonesia Kuno. Hal ini pula yang menempatkan peran penting gunung dalam kosmologi Gunung Daik, dalam tata ruang Kesultanan Lingga-Riau-Johor ketika beribukota di Daik, Pulau Lingga.²⁴

Pada akhirnya, paper ini akan mencari apakah makna Melayu sesungguhnya terkait dengan dunia klasik Melayu di masa Sriwijaya. Sebagai suatu identitas kolektif tidaklah memungkinkan untuk menggambarkan penggunaan identitas Melayu diawali oleh faktor keteracakan. Identitas sangat ditentukan oleh pola kekuasaan itu sendiri karena memiliki peran dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal. Salah satu contoh menarik adalah bagaimana identitas bangsa Cina ataupun Sunda ditentukan oleh nama kekuasaan yang melingkupinya. Istilah Sunda dilekatkan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kerajaan Sunda-Hindu dengan ibukotanya Pajajaran, sehingga secara tidak langsung direpresentasikan sebagai penduduk negeri Sunda.

Terkait hal tersebut, pemaknaan Melayu juga terkait dengan pola kekuasaan yang berada di kurun periode ini, dan hal ini tampak dari bagaimana etimologi kata 'Melayu' itu sendiri. Melayu atau Malay berasal dari bahasa Sanskrit yang berarti "**kota di atas bukit**". Arti serupa mengenai Melayu juga dapat ditemukan di dalam bahasa Hindi modern dan Tamil. Pemaknaan ini hakikatnya menunjukkan kesesuaian dengan kehadiran penamaan geografis kuno wilayah di sekitar Bukit Seguntang pada masa Sriwijaya. Penamaan Melayu memiliki kesejajaran dengan kehadiran pemukiman kuno pra-Sriwijaya-Budhis yang menamakan wilayah tersebut sebagai daerah Melayu dengan pusat kota berada pada pemukiman di Bukit Seguntang. Meskipun sebagian besar peninggalan pra-Sriwijaya-Budha merupakan peninggalan kultur Hindu dan bahkan pra-Hindu, hal tersebut justru menunjukkan peran penting wilayah sekitar Bukit Seguntang sebagai pusat pemukiman awal dan hubungan internasional dengan dunia barat. Keberadaan mitologi keturunan Alexander Agung

²⁴ Angeelbeek, *Op.cit.*, hlm. 29

setidaknya menggambarkan wilayah Sungai Musi telah berinteraksi dengan India setidaknya sejak abad ke-3 SM ketika Kerajaan Macedonia yang berkebudayaan Helenik melakukan ekspansi dan berhasil menguasai wilayah luas dari Eropa hingga Persia, dan akhirnya gugur di India.

Akan tetapi pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa penggunaan kata Melayu juga hadir di berbagai wilayah di samping penggunaan istilah Melayu yang didukung oleh kehadiran pusat kekuasaan utama sebagaimana kerajaan Sriwijaya. Keterbatasan sumber data di tiap penempatan identifikasi Melayu di luar Sriwijaya tentu menjadi problema tersendiri. Akan tetapi sekiranya dengan menggunakan pendekatan *zeitgeist* serta komparasi data dengan unsur kesejarahan dan budaya dari wilayah Indonesia lainnya dapat membantu interpretasi mengenai pemaknaan Melayu.

Hal pertama adalah peran kekuasaan dalam memberi kedudukan suatu nilai menjadi nilai ideal dalam kerangka konseptual budaya politik tradisional. Sriwijaya sebagai kerajaan terbesar di masanya berperan menempatkan kerangka stratifikasi nilai dan makna yang terkandung dalam unsur-unsur kulturalnya. Identitas geografis, dan juga sosio kultural, Melayu pra-Sriwijaya pada penduduk Sungai Musi, tidak serta merta sirna. Perubahan nama Melayu menjadi Sriwijaya merupakan hal umum dari perubahan suatu rezim tradisional mengenai penamaan dan pembentukan identitas kultural baru, dan hal ini menunjukkan adanya perubahan dari kerajaan dan masyarakat Hindu menjadi Budha. Di sisi lain unsur kekuasaan Hindu-Budha juga berperan dalam stratifikasi dan diferensiasi nilai itu sendiri. Penempatan unsur-unsur Hindu-Budha sebagai unsur sakral menempatkan bobot elemen-elemen Hindu-Budha sendiri memiliki kandungan sakral dan magis lebih tinggi ketimbang unsur lokal sebagai suatu hal yang tak terjangkau. Hal ini ditentukan oleh unsur kekuasaan dan legitimasi politik, sosial, dan kultural yang melekat padanya dengan menempatkan pemegang kekuasaan beserta elemen-elemennya sebagai sumber pengetahuan atas religi itu sendiri.

Perbedaan masa modern dengan periode sebelumnya adalah pola stratifikasi dan diferensiasi sosio kultural atas semua unsur kehidupan sosial budaya, termasuk kehidupan religi itu sendiri. Dengan kata lain religi merupakan salah satu elemen penting dalam stratifikasi dan legitimasi kekuasaan tradisional sehingga menciptakan ruang terpisah antara budaya istana (penguasa) dan budaya rakyat. Bagi rakyat kebanyakan, ketidakterjangkauan kekuasaan dan budayanya menyebabkan pemisahan dan hasrat untuk internalisasi budaya istana. Dengan kata lain, bagi rakyat yang subordinat, budaya istana merupakan suatu dunia utopis dan sumber-sumber nilai dalam upaya mobilitas sosial ataupun duplikasi. Komparasi atas hal ini sesungguhnya dapat dilihat pada kesultanan-kesultanan yang ada di masa sesudahnya. Kesejajaran antara penguasa Hindu-Budha dan kesultanan sebagai penjaga agama menekankan adanya legitimasi kultural dan agama, serta diiringi berbagai diferensiasi sosio kultural di dalamnya.²⁵

Terkait dengan *zeitgeist* di masa kuno, Melayu sebagai kata serapan dari India yang merupakan akar nilai religi Hindu dan Budha memiliki bobot sakral dan magis yang sangat kuat. Makna kata Melayu sebagai kota di atas bukit memiliki peran sebagai penunjuk geografis menempatkan kata Melayu untuk digunakan oleh berbagai tempat yang menunjukkan adanya unsur kekuasaan yang diakui dalam konteks budaya politik di masa Hindu-Budha. Penamaan geografis sebagai Melayu, pada masa ini berkonotasi positif dan bertujuan mulia bagi masyarakat pendukungnya. Komparasi atas hal ini dapat dilihat dengan berbagai penamaan pemukiman di Jawa yang memiliki kemiripan dalam usaha menciptakan standarisasi nilai terhadap kategori pemukiman seperti penggunaan kata *karta*, *rejo*, *suro*, dll. Di sisi lain penempatan kata Melayu sebagai suatu pola umum penamaan pemukiman setidaknya merupakan indikasi awal guna menelaah lebih mendalam bahwa apakah penamaan Melayu menunjukkan suatu gejala tunggal dari suatu pemukiman ataukah ia berkorelasi dengan

²⁵ Pheres Sunu Widjayengrono, "Pertanian rakyat dan perkebunan Eropa di Karesidenan Ternate 1860-1920", Tesis Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2009, hlm. 55-56.

tingkatan tata ruang pemukiman berdasarkan kepadatan dan aktivitasnya sebagaimana etimologi Maluku yang sesungguhnya bermakna sebagai tata ruang pemukiman terbesar dalam struktur tata ruang tradisional di antara penduduk tradisional Maluku.

PENUTUP

Pemaknaan kata Melayu, dimana kini umum digunakan sebagai identitas suatu kesatuan suku bangsa, sesungguhnya memiliki arti luas dan mendalam. Masyarakat yang kini diidentifikasi dalam identitas Melayu berupaya mengidentifikasi makna Melayu sesuai periodenya masing-masing. Tentu saja, di dalam upaya memahami dalam kerangka *zeitgeist*, setiap upaya pemaknaan Melayu memiliki nilai dan bobotnya sesuai dengan periodenya masing-masing yaitu masa kontemporer, masa madya, dan masa kuno. Justifikasi dan prasangka buruk seringkali membuat pemihakan dan penilaian atas masing-masing makna, dimana seringkali hanya bersandar atas pemahaman masa kini tanpa berupaya memahami perbedaan atas pola dan karakteristik dari suatu periode sehingga membangun pola berfikir anakronistis. Seluruh pemaknaan adalah benar karena setiap pemaknaan Melayu merupakan jawaban dari tiap-tiap *zeitgeist* di suatu periode. Penelusuran etimologi Melayu hingga ke masa Hindu-Budha merupakan awal mula dari diperkenalkannya istilah Melayu sebagai suatu identifikasi ruang geografis dengan kombinasi kekuasaan Sriwijaya yang dominan. Pergeseran makna pasca keruntuhan Sriwijaya merupakan upaya delegitimasi kekuasaan dan rekonstruksi ideologi baru dalam menempatkan kesatuan sosial, kultural, dan linguistik Melayu dalam posisi politik dan kultural subordinat. Upaya reidentifikasi makna Melayu oleh masyarakat pendukungnya disesuaikan dengan berbagai perubahan tata nilai dan moral yang berlaku sehingga menyebabkan pergeseran kembali makna agar sesuai dengan jamannya. Ketiga bentuk pemaknaan Melayu tidak terlepas dari “unsur kekuasaan sebagai landasan” dari persebaran maknanya.

Artikel ini sendiri bertujuan untuk mendiskusikan kembali bagaimana menelusuri ulang pemaknaan Melayu. Pada hakikatnya artikel ini hanya merupakan awal dan titik kecil dari pemahaman utuh atas keseluruhan dunia Melayu sesungguhnya. Masih banyak poin-poin penting lainnya guna menyusun kepingan demi kepingan dalam pemahaman utuh dunia Melayu seperti akar dan tradisi migrasi masyarakat Melayu, karakteristik kultural Melayu pesisir dan daratan, elemen-elemen sosial, politik, dan ekonomi dari berbagai sudut pandang. Di samping itu, artikel ini tentu memiliki kelemahan atau ketidakpuasan dari pembaca sehingga menjadikannya terbuka untuk didiskusikan dan diperdebatkan. Jika memang terdapat sanggahan, kritik, ataupun masukan kepada substansi artikel, hal tersebut tentu menggembirakan penulis agar menelaah lebih luas dalam menguak endapan sejarah dan budaya Melayu guna rekonstruksi identitas Melayu seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard. 1993. *The World of Maluku, Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Angelbeek, C. van. 1862. *Korte Schets van het Eiland Lingga en Deszelfs Bewoners*. Batavia: Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

- Cartesao, Antonio. 1944. *The Suma Oriental of Tomi Pires, An Account of the East, From the Red Sea to Japan, Written in Malacca 1512-1511 and the Book of Fransisco Rodrigues*. Lessing-Druckerel: Wiesbaden.
- Donkin, R.A. 2003. *Between East and West: The Moluccas and The Traffic in Spices*, American Philosophical Society.
- Dupoizat, Marie-France, Untung Sunaryo, Heddy Surachman, 2008. *Barus: Seribu Tahun Yang Lalu*, Jakarta: KPG.
- Evi Susanti, "Transkrip sejarah lisan: eksistensi drama tradisional Makyong di Pulau Panjang di era reformasi", Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau Kepulauan Batam, 2013.
- Fraassen, Christiaan van. 1976. "Drie plaatsnamen uit Oost-Indonesië in de Nagara-Kertagama: Galiyao, Muar en Wwanin en de vroege handelsgeschiedenis van de Ambonse eilanden" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 132 (1976)*, no: 2/3, Leiden.
- Leo Suryadinata, Ed. 1997. *Political Thinking of the Indonesian Chinese, 1900-1977: A Sourcebook*. Singapore: NUS Press.
- Hageman, J. *Geschiedenis der Veroveringen in Malaka en der Oorlogen Tuschen de Portuguezen en Malaiers*.
- Haji Abdul Malik dkk. 2012. *Sejarah Kejuangan dan Kepahlawanan Sultan Mahmud Riayat Syah, Yang Dipertuan Besar Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang (1761-1812)*. Daik-Lingga: Pemerintah Kabupaten Lingga.
- Hefner, Robert. 1997. "Java's Five Regional Cultures" in Eric Oey, Ed. Singapore: Periplus Editions.
- Kozok, Uli. 2006. *Kitab Undang-undang Tanjung Tanah: Naskah Melayu yang Tertua*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lombard, Denys. 2005. *Nusa Jawa: Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Majumdar, Ramesh Chandra. 1986. *Suvarṇadvīpa: Political History*, New Delhi: Gyan Publishing House.
- N. Daldjoeni. 1987. *Geografi Kesenjaraan*, Bandung: Alumni.
- Noorduyn, J. 1978. "Majapahit in the fifteenth century" dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 134 (1978)*, no: 2/3, Leiden.
- Pande, Govind Chandra. 2006. *India's Interaction with Southeast Asia*, New Delhi: Project of History of Indian Science, Philosophy, and Culture, Centre for Studies in Civilizations Volume 1, Part 3.